



Jurnal Manajemen FE-UB

ISSN 2338 6584

Volume 005 Nomor : 001 Tahun 2017

*Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Terhadap Motivasi Dan Implikasinya
Pada Kinerja Karyawan Pt. Askrindo
Alwin Septiaman Putra Dan Cicih Ratnasih*

*The Capital Assets, Management, Earning, Liquidity
Wahyu Murti*

*Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja dan Dampaknya
Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Pusat
Zurlisa dan Tauty Setyowati*

*Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja
Karyawan Pt. Izone Indonusa C&F Perfumery
Mega Maskasari dan Arni Kurniati*

*Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dengan
Metode Eoq (Economic Order Quantity) Pada Pt. Inti Kiat Alam
Hendrawati Fakultas Ekonomi Universitas Azzahra*

*Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental dan Resiko Sistematis terhadap
Stock Return PT. Astra Agro Lestari Tbk. (Period 2000 – 2009)
Erna B. Sitanggang dan Elsyia Meida*

*Keterkaitan Kepemimpinan Dan Kompensasi Dengan Prestasi Kerja Karyawan
Pada Pt. Multi Informatika Solusindo
Mohammad Luqman Hakim dan Muhammad Halilintar*

*Pengaruh Working Capital Turnover dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Assets
Pada PT. Kalbe Farma Tbk dari Tahun 2003-2015
Jerrey Rusli dan Yolanda*

*Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Terhadap Perekonomian Indonesia
Sumarni*

UNIVERSITAS BOROBUDUR - JAKARTA

Jurnal
Manajemen FE-UB

Vol. 005

No. 001

Halm. 1-145

Jakarta
April 2017

ISSN
2338-6584

Peranan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Terhadap Perekonomian Indonesia

Oleh : Sumarni

Abstract

Small and Medium Enterprises are many business activities in demand after an economic crisis that impacts on layoffs big companies. SME sector support provides opportunities employment opportunities for the unemployed in the world of government work as well as medium and large companies. The aim of this study to find out the profile of SMEs in Indonesia, employment opportunities provided on the activities of SMEs, Contribution of SMEs to GDP. In this writing using descriptive method, do the analysis only until descriptive level, ie analyzing and presenting the facts systematically so it can be easier to understand and infer. Result of this study is: viewed from the profile of SMEs, the number of SMEs the most many engaged in trading and at least move on electricity and water; Number of SME entrepreneurs both men and women whose primary education is 7,597,595 people, at most Little Diploma III, that is as many as 252,049 people, in total amount male and female entrepreneurs are 22,513,552 persons; Contribution of SMEs in absorbing labor as much as 43,911,721 people, most in trade and at least in the electric field and drinking water; Contribution of SMEs in Broto Domestic Product is Rp.1.648.555.770.662, -.

Keywords: SME, Profile, Donation

1. PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2014 perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah optimistis pada 2014 pertumbuhan ekonomi menembus level 6 persen, lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 yang mencapai 5,7 persen. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014, dua faktor tersebut adalah pertama, dampak pemilu dan kedua, membaiknya neraca perdagangan Indonesia dimana neraca perdagangan surplus pada Desember 2013 sebesar US\$ 1,5 miliar.

Membaiknya neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2013 juga mempengaruhi laju perekonomian tahun 2014. Surplus neraca perdagangan membuktikan bahwa kinerja ekspor semakin membaik,

membaiknya kinerja ekspor disebabkan karena kondisi perekonomian global sudah mulai stabil.

Namun masih terdapat masalah struktural di dalam pengelolaan perekonomian kita, yaitu Defisit Transaksi Berjalan (DTB) yang lebar dan laju inflasi yang cukup tinggi. Karena dua indikator ini dinilai masih harus diperbaiki, maka kurs rupiah pun terkena getahnya. Sepanjang tahun lalu, rupiah telah terdepresiasi sekitar 26% dimana rata-rata kurs rupiah berada di level Rp. 9.460 per dolar AS.

Jika menilik asumsi sejumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,6%-6,2% dengan laju inflasi berkisar 3%, maka Bank Indonesia bersama pemerintah harus kerja ekstra keras di tengah perhelatan pesta demokrasi. (Business News, 2014)

Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari perkembangan suatu bangsa dan ukuran bagi tingkat kemakmuran

masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran masyarakatnya, dan juga sebaliknya semakin tinggi tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai baik buruknya perekonomian suatu negara dan tolak ukur kesejahteraan masyarakat pada umumnya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product (GDP)*.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub sektor yang dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) salah satunya adalah sektor ekonomi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Produk Domestik Bruto (PDB) hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. PDB terbagi atas dua yaitu PDB real dan PDB nominal. Di dalam PDB terdapat konsumsi personal, pembelian pemerintah, persediaan, dan neraca perdagangan (ekspor dan impor).

Untuk itu pemerintah harus dapat mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi negara tetap stabil dan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu upaya yang harus ditempuh pemerintah adalah meningkatkan neraca perdagangan dengan cara meningkatkan kemampuan UMKM di Indonesia agar produk yang dihasilkan mampu bersaing baik didalam negeri maupun di luar negeri sehingga memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, pangsa UMKM di Indonesia saat ini mencapai 99,9% dari total 55,2 juta unit usaha. Aktivitas bisnis UMKM berkontribusi 97,16% terhadap

penyerapan tenaga kerja dan menyumbang 57,94% terhadap PDB nasional. Disamping itu UMKM sudah terbukti mampu bertahan dari gelombang krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Dengan meningkatnya kemampuan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan neraca perdagangan serta sekaligus dapat menyumbang terhadap peningkatan *Product Domestic Bruto (PDB)* secara nasional.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia?
2. Bagaimana peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia?

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) adalah :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria :
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Perkembangan UMKM di Indonesia

Perkembangan UMKM yang ada di Indonesia dewasa ini dapat dilakukan melaju dengan pesat seiring dengan kemampuan UMKM yang dapat bertahan dalam menghadapi krisis globalisasi yang terjadi di Indonesia. UMKM mulai diperhatikan oleh berbagai kalangan baik dari pengusaha, pemilik modal maupun dari pemerintah, karena UMKM sudah terbukti dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDB nasional. Disamping itu UMKM dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding usaha besar. Menurut data BPS (2013) UMKM berkontribusi 97,16%

terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga hal ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan dikarenakan berhasil menyumbang 57% dari PDB (Data BPS 2006-2010) dimana UMKM meningkat bukan hanya dari segi kuantitas melainkan tenaga kerja, modal serta asset mereka. UMKM juga dikatakan usaha ekonomi produktif yang cukup kuat, sekalipun terjadi gejolak atau krisis UMKM tidak terkena dampak yang begitu menyedihkan. Hal tersebut karena prinsip kemandirian yang dimiliki yang artinya UMKM memiliki modal sendiri dan tidak terlalu bergantung pada lembaga lain sehingga membuat mereka kokoh hingga saat ini dan menjadi katup perekonomian negara. (Kompasiana, 2013)

Pencapaian peningkatan bagi UMKM ini tidak didapat hanya dengan waktu yang singkat. Masih banyak tantangan yang harus dilalui dan banyak masalah yang harus diselesaikan baik secara modal, tenaga kerja, kegiatan produksi dan hal lainnya. Sehingga apabila terdapat UMKM yang tidak siap dan tak mampu menghindari atau mengatasi gejolak yang datang maka tidak mustahil akan ada juga UMKM yang kolaps.

Pengembangan UMKM di Indonesia

Kendala yang dihadapi UMKM di Indonesia pada umumnya adalah masalah struktur permodalan, lemahnya akses pemasaran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini membuat banyak UMKM dipandang tidak *feasible* untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya.

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, berikut beberapa pilihan strategi yang dilakukan dalam pengembangan UMKM, yaitu: (*Simposium Nasional, 2010*)

1. Kemudahan dalam Akses Permodalan

Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM adalah aspek permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UMKM pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

Yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan UMKM melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan. Cara ini selai mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, kredit Perbankan lebih banyak tekonsentrasi pada kredit korporasi dan juga konsumsi dan

hanya segelintir kredit yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas UMKM ini, Perbankan harus menjadikan sektor ini sebagai pilar terpenting perekonomian negeri. Bank diharapkan tidak lagi hanya memburu perusahaan-perusahaan yang telah mapan, akan tetapi juga menjadi pelopor untuk mengembangkan potensi perekonomian dengan menumbuhkan wirausahawan melalui dukungam akses permodalan bagi pengembangan wirausaha, baru di sektor UMKM. Perbankan harus meningkatkan kompetensinya dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan memberikan solusi total melalui dari menjaring wirausahawan baru potensial, membinanya hingga menumbuhkannya. Pemberian kredit inilah satu mata rantai dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah secara utuh.

Selain kemudahan memperoleh modal dari dalam negeri, UMKM juga bisa diarahkan dan diusahakan kepada kemudahan akses dalam memperoleh modal asing atau investasi penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment*). Akan tetapi PMA ini harus dibatasi demi kepentingan usaha lokal seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang PMA seperti kebijakan pembatasan usaha bagi pelaku usaha asing misalnya adanya Daftar Negatif Investasi (DNI) yang secara berkala direview, (ii) kewajiban divestasi kewajiban untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil & Menengah (Kemitraan UMKM), kewajiban memprioritaskan local content (*Prioritas Local Content*).

Kemitraan dengan UMKM dimaksudkan agar pihak PT PMA dapat membagi peran dalam kegiatan usahanya dengan pengusaha kecil dan menengah dan pada saat yang sama pengusaha UMKM memiliki kesempatan untuk membangun jaringan kemitraan dan belajar menjalankan usaha secara mandiri dengan pihak asing, sehingga semangat kewirausahaan pengusaha lokal dapat dibangun, dan pada saat yang

sama PT PMA dapat melakukan fungsi *outsourcing* atau pembagian tugas produksi tertentu dengan pengusaha UMKM.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu, komponen penting dalam usaha pemberdayaan UMKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

Dengan adanya kemitraan yang telah dibangun antara UMKM dan PT PMA diharapkan pihak PT PMA untuk dapat memperkenalkan UMKM di luar negeri sehingga produk lebih dikenal.

3. Pengembangan Skala Usaha

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama.

Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke

lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antara skala usaha dan jenis usaha, pasar barang dan pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi dalam realitasnya masih belum berjalan optimal. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UMKM di Indonesia. Meskipun sayangnya banyak industri kecil yang justru tidak memiliki jaringan sub kontrak dan keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga eksistensinya pun menjadi sangat rentan. Sedangkan pola pengembangan jaringan melalui pendekatan kluster, diharapkan menghasilkan produk oleh produsen yang berada di dalam kluster bisnis sehingga mempunyai peluang untuk menjadi produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat bersaing dipasar global.

Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya kontak dengan berbagai pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang baik di dalam maupun di luar negeri, pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis UMKM serta pengembangan situs-situs UMKM di seluruh kantor perwakilan pemerintah di luar negeri.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama,

dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dalam eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha kecil menengah di Indonesia adalah karena kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Manajemen yang ada relatif masih tradisional.

Oleh karena itu dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usaha. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, *on the job training*, pemagangan dan kerja sama usaha.

Selain itu, salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia di sektor UMKM adalah Pendampingan. Pendampingan UMKM memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan

pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping tetap, bukan pendamping yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

6. Peningkatan Akses Teknologi

Penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Di negara-negara maju keberhasilan usaha mikro kecil menengah ditentukan oleh kemampuan akan penguasaan teknologi. Strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan usaha kecil menengah adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan UMKM, pengembangan pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan pusat penyuluhan dan difusi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan peningkatan kerjasama antara asosiasi-asosiasi UMKM dengan Perguruan Tinggi atau pusat-pusat penelitian untuk pengembangan teknologi UMKM.

7. Mewujudkan Iklim Bisnis yang Lebih Kondusif

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah akan sangat ditentukan dengan ada atau tidaknya iklim bisnis yang menunjang perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Persoalan yang selama ini terjadi iklim bisnis kurang kondusif dalam menunjang perkembangan usaha seperti terlihat dengan masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak pro bisnis merupakan bukti adanya iklim yang kurang kondusif. Oleh karena perbaikan iklim bisnis yang lebih kondusif dengan melakukan reformasi dan deregulasi perijinan bagi UMKM merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengembangkan UMKM. Dalam hal ini perlu ada upaya untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang

efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja UMKM. Selain itu perlu ada tindakan untuk melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat, keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelaan terhadap praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan didukung penyempurnaan perundang-undangan serta pengembangan kelembagaan.

Peranan UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, pangsa UMKM di Indonesia saat ini mencapai 99,9% dari total 55,2 juta unit usaha. Aktivitas bisnis UMKM berkontribusi 97,16% terhadap penyerapan tenaga kerja dan menyumbang 57,94% terhadap PDB nasional. Disamping itu UMKM sudah terbukti mampu bertahan dari gelombang krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Dengan adanya data tersebut bukti bahwa UMKM dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding dengan usaha besar lain yang ada di Indonesia, hal ini menyebabkan berkurangnya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Demikian juga dengan adanya data yang menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi 57,94% terhadap PDB nasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM memiliki peranan yang cukup besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.

Peranan UMKM yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia tidak terlepas dari adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membantu pemberdayaan UMKM di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana Undang-undang tersebut UMKM mendapatkan pengecualian sehingga tidak dapat diberikan sanksi administrasi. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) yang sekaligus sebagai perintah, amanah dan kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan UKM dengan sungguh-sungguh. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia sebagai berikut :

- a. Perkembangan UMKM dewasa ini mengalami peningkatan cukup pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kepedulian berbagai pihak yang mulai tertarik dengan UMKM yang mampu bertahan dari gelombang krisis dan tepat menyerap jumlah tenaga kerja yang besar dibanding usaha besar lainnya serta mampu memberi sumbangan cukup besar terhadap PDB nasional.
- b. UMKM memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, aktivitas bisnis UMKM berkontribusi 97,16% terhadap penyerapan tenaga kerja dan menyumbang 57,94% terhadap PDB nasional. Disamping itu UMKM sudah terbukti mampu bertahan dari gelombang krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kemampuan bertahan UMKM ini merupakan jaminan bagi keamanan dalam negeri dalam menghadapi krisis ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Sri Suwarni, 2008, *Dampak Perundang-undangan Penanaman Modal Perekonomian*
- Jurnal Asia, 2013, *Pemerintah Bekali UKM hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jakarta.
- Kompasiana, 2013, *Perkembangan Koperasi dan UKM di Indonesia*. Jakarta.
- Siregar, Ahmad Ramadhan, 2011, *Globalisasi dan Persaingan Usaha*, Humaniora, Bandung.
- Sriyana, Jaka, 2010, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus Di Kabupaten Bantul*, Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif.
- Susanta, Gatut dan M. Azrin Syamsuddin, 2009, *Cara Mudah Mendirikan Mengelola UMKM*. Penerbit: Raih Asa Sukses, Surabaya.
- Tambunan, Tulus, 2007, *Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing*, Seminar Bank Indonesia, Jakarta.
- www.bps.go.id, diakses pada tanggal 1 Maret 2014
- www.beritamometer.com diakses pada tanggal 1 Maret 2014
- www.businessnews.co.id, diakses pada tanggal 1 Maret 2014
- www.depkop.go.id, diakses pada tanggal 1 Maret 2014